



Analysis of the Effectiveness of the Value Added Tax (VAT) Collection System on Taxpayer Compliance in Indonesia

Asrul Azmi Nicolas¹, Bima Pratama², Jemmy Ricardo^{3*}, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

University Of Lampung

Corresponding Author: Jemmy Ricardo, jemmyricardo12@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: E-Invoice, Tax Compliance, Value Added Tax, Collection System, Taxpayer

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 30, May

©2026 Nicolas, Pratama, Ricardo, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tax revenue is a key driver of national development, yet achieving its targets is often hampered by fluctuating levels of public compliance. To address this challenge, digital transformation through modernizing administrative systems such as the implementation of e-Filing and e-Billing plays a crucial role in bureaucratic reform efforts. This reform is specifically designed to minimize maladministration, reduce compliance costs, and improve the integrity of the tax system. Although the technological infrastructure is in place, its implementation cannot operate independently. Therefore, this literature review aims to analyze in-depth the effectiveness of the synergy between tax technology adoption and taxpayers' intrinsic awareness. Using a qualitative descriptive approach, analyzing various empirical data and the latest academic literature, this study confirms consistent findings. It found that infrastructure modernization and increased taxpayer awareness, when driven simultaneously, have a positive and significant impact on increasing taxpayer compliance. Digital systems have proven effective in minimizing procedural obstacles, long queues, and bureaucratic complexity that often discourage taxpayers from reporting. On the other hand, because our tax system relies on a self-assessment mechanism, tax literacy is the main pillar or foundation that truly shapes the public's voluntary compliance. No matter how good the facilities provided, their effectiveness will decline if not balanced with user literacy. In conclusion, achieving effective tax revenue targets cannot rely solely on one aspect. A real balance is needed between providing adequate digital infrastructure and efforts to build taxpayer awareness and literacy. These educational efforts must be consistently implemented to foster a culture of tax compliance that is deeply rooted in society

Analisis Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Asrul Azmi Nicolas¹, Bima Pratama², Jemmy Ricardo^{3*}, Mega Metalia⁴, Ratna Septiyanti⁵

Universitas Lampung

Corresponding Author: Jemmy Ricardo, jemmyricardo12@gmail.com

ARTICLE INFO

Katakunci: PPN 12%, Pajak Regresif, E-Faktur, Kepatuhan Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Sistem Pemungutan, Wajib Pajak

Received : 2, March

Revised : 16, April

Accepted: 30, May

©2026 Nicolas, Pratama, Ricardo, Metalia, Septiyanti: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penerimaan pajak merupakan penyokong utama pembangunan nasional, namun pencapaian targetnya sering terhambat oleh fluktuasi tingkat kepatuhan masyarakat. Menghadapi tantangan ini, transformasi digital melalui modernisasi sistem administrasi—seperti penerapan e-Filing dan e-Billing—memainkan peran krusial dalam upaya reformasi birokrasi. Langkah pembaruan ini secara spesifik dirancang untuk meminimalisasi praktik maladministrasi, memangkas biaya kepatuhan, serta meningkatkan integritas sistem perpajakan. Walaupun infrastruktur teknologi telah tersedia, penerapannya tidak bisa berjalan secara mandiri. Oleh karena itu, kajian literatur ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas sinergi antara adopsi teknologi perpajakan dengan tingkat kesadaran intrinsik wajib pajak.

Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dengan menelaah berbagai data empiris dan literatur akademik mutakhir, penelitian ini mengonfirmasi temuan yang konsisten. Ditemukan bahwa modernisasi infrastruktur dan tingginya kesadaran wajib pajak, apabila didorong secara simultan, memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan pelaporan. Sistem digital terbukti andal dalam meminimalisasi berbagai hambatan prosedural, antrean panjang, serta kerumitan birokrasi yang selama ini kerap membuat masyarakat enggan melapor. Di sisi lain, karena sistem perpajakan kita bertumpu pada mekanisme self-assessment, pemahaman perpajakan menjadi pilar atau fondasi utama yang sesungguhnya membentuk niat patuh masyarakat secara sukarela. Sebaik apa pun fasilitas yang disediakan, efektivitasnya akan menurun jika tidak diimbangi dengan literasi penggunaannya.

Kesimpulannya, capaian target penerimaan pajak yang efektif tidak bisa hanya mengandalkan satu aspek. Diperlukan keseimbangan nyata antara penyediaan infrastruktur digital yang memadai dan upaya pembangunan kesadaran literasi wajib pajak. Langkah edukasi ini harus terus dijalankan secara konsisten agar terbentuk budaya taat pajak yang mengakar di tengah masyarakat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menopang keberlangsungan pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia. Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penerimaan dari sektor perpajakan selalu menjadi kontributor terbesar yang menentukan kemandirian ekonomi negara. Akan tetapi, fluktuasi pencapaian target penerimaan acapkali terjadi, di mana salah satu akar masalah terbesarnya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang belum mencapai titik optimal. Ketidakepatuhan ini, baik yang disengaja maupun yang timbul akibat ketidaktahuan prosedural, menjadi tantangan berkesinambungan bagi otoritas perpajakan di Indonesia.

Merespons dinamika tersebut, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus mengupayakan reformasi birokrasi perpajakan yang difokuskan pada digitalisasi layanan. Transformasi digital melalui sistem administrasi elektronik (seperti e-Registration, e-Billing, dan e-Filing) bertujuan menyederhanakan regulasi yang kompleks serta menekan compliance cost yang kerap dikeluhkan oleh masyarakat. Implementasi teknologi diyakini dapat membangun ekosistem perpajakan yang lebih transparan dan efisien. Namun, penyediaan teknologi mutakhir tidak akan berdampak maksimal tanpa diiringi oleh pemahaman atau literasi perpajakan dari subjek pajaknya itu sendiri.

Dalam sistem self-assessment yang dianut oleh Indonesia, kepercayaan penuh diberikan kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, seberapa efektif modernisasi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada seberapa jauh masyarakat didukasi dan memahami kewajibannya. Beranjak dari realitas tersebut, artikel ini bermaksud menelaah signifikansi pengaruh sistem e-Filing yang bersinergi dengan tingkat pemahaman perpajakan dalam mendongkrak kepatuhan Wajib Pajak.

Sebagai entitas pencari laba, perusahaan senantiasa berusaha menemukan berbagai cara untuk mencapai hasil yang efektif dan efisien guna meningkatkan keuntungan. Secara umum, terdapat berbagai cara untuk menilai kinerja suatu perusahaan, salah satunya adalah dengan mengevaluasi kinerja keuangannya. Kinerja keuangan mencerminkan bagaimana operasi bisnis perusahaan dijalankan dan seluruh hasil yang telah dicapai perusahaan dari operasi tersebut. Keberhasilan bisnis diukur dari manfaat yang dicapai oleh organisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba merupakan faktor utama dalam menilai kinerja keuangannya (Siregar, Syahyunan, & Miraza, 2022).

Oleh karena itu, kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui profitabilitas atau perolehan labanya. Salah satu sektor dengan prospek laba yang kuat dan penerimaan tertinggi bagi negara adalah pertambangan batubara. Hal ini dikarenakan industri

Pertambangan batubara memainkan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini tidak hanya memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara melalui ekspor dan pajak karena keuntungannya

yang tinggi, tetapi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat (Gudio, 2025).

CNBC Indonesia menyusun rangkuman laba perusahaan terkait batubara berikut ini yang menunjukkan dinamika pasar. Penurunan tajam laba perusahaan batubara tidak mengherankan. Hal ini karena harga batubara telah turun secara signifikan sepanjang tahun. Berdasarkan data Refinitiv, pada hari Kamis (31 Juli 2025), harga batubara ditutup pada US\$117,4 per ton, naik tipis 0,27% selama satu hari perdagangan. Sayangnya, sejak awal tahun, harga bahan bakar fosil ini tetap berada di zona merah, turun lebih dari 8%. Selama tiga tahun terakhir, harga batubara juga terus menurun setiap tahunnya (Endri, Utama, Effendi, Santoso, & Bahiramsyah, 2021).

Penurunan terburuk terjadi pada 2023, ketika harga anjlok lebih dari 60%, diikuti oleh penurunan hampir 15% pada 2024. Namun, penurunan harga dalam dua tahun tersebut dapat dianggap sebagai normalisasi, karena tahun 2022 terjadi anomali di mana harga batubara melonjak melewati level US\$400 per ton. Pada tahun 2024, PT Bumi Resources Tbk (BUMI), perusahaan pertambangan batubara yang terafiliasi dengan Grup Bakrie dan Salim, melaporkan penurunan kinerja yang signifikan. Menurut laporan keuangan yang diserahkan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin, 1 April 2024, perusahaan tersebut hanya mampu membukukan laba bersih sebesar US\$ 10,92 juta untuk setahun penuh 2023. Angka ini anjlok 97,92% dibandingkan laba tahun sebelumnya sebesar US\$ 525,27 million.

Penurunan laba perusahaan juga berdampak pada kinerja keuangan perusahaan, karena kinerja keuangan diukur dengan menggunakan laba perusahaan. Akibatnya, fokus pada profitabilitas ini menyebabkan perusahaan mengabaikan potensi dampak lingkungan negatif dari proses produksi mereka (Pramudianti, 2023). Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh operasi perusahaan pertambangan bukanlah kejadian yang terisolasi; hal itu sering terjadi. Hal ini dikarenakan aktivitas operasional perusahaan terlalu difokuskan pada peningkatan laba dan pengalokasian sumber daya untuk menciptakan peluang investasi baru yang menghasilkan imbal hasil lebih besar. Namun, banyak perusahaan mengabaikan penerapan praktik pengelolaan lingkungan yang tepat, yang merusak reputasi mereka dan berujung pada kinerja yang buruk, yang pada akhirnya memengaruhi hasil keuangan mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Teori Pemangku Kepentingan pertama kali dikemukakan oleh Freeman dan McVea pada tahun 1984. Hal ini merujuk pada individu atau kelompok yang memiliki potensi untuk memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu, sebagaimana didefinisikan oleh Deswanto dan Siregar (2018). Teori ini berpendapat bahwa suatu perusahaan tidak seharusnya hanya berfokus pada kepentingan internal, melainkan juga memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingan yang tertarik atau terlibat. Masyarakat juga merupakan pemangku kepentingan perusahaan; oleh karena itu, perusahaan berkewajiban untuk memberikan nilai kepada masyarakat.

Salah satu cara untuk mewujudkannya adalah dengan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Ketika suatu perusahaan terlibat dalam CSR, masyarakat akan menuai manfaatnya. Akibatnya, baik masyarakat maupun investor akan mempercayai perusahaan karena perusahaan menjaga citra dan reputasinya. Jika suatu perusahaan menjunjung tinggi reputasinya, ia akan bertahan. Investor juga tertarik pada perusahaan yang diharapkan memiliki masa depan jangka panjang. Salah satu cara untuk tetap berkelanjutan adalah dengan menjaga hubungan dengan masyarakat, seperti melalui CSR, dan mengelola biaya lingkungan (Ardiansyah, 2024).

Para pemangku kepentingan ini mencakup berbagai pihak, seperti pemegang saham, investor, karyawan, dan pemasok. Peran teori pemangku kepentingan dalam penelitian ini adalah untuk memfasilitasi perusahaan dalam memperkuat hubungan dengan pihak eksternal dan mengembangkan keunggulan kompetitif sebagai sarana bagi perusahaan untuk beradaptasi dengan mudah dan secara positif terhadap kinerja keuangan mereka. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi mencerminkan praktik manajemen yang sukses. Menurut teori pemangku kepentingan, profitabilitas yang tinggi berbanding lurus dengan tingkat kepuasan pemangku kepentingan, mengingat perusahaan dikelola dengan baik.

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan mekanisme kunci bagi perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan. Sebagai contoh, perusahaan pertambangan batubara yang secara proaktif melaksanakan program rehabilitasi lahan, pengelolaan limbah, atau pengembangan masyarakat akan meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung reputasi jangka panjang mereka. Reputasi yang kuat akan menarik investor dan meminimalkan konflik sosial, serta memberikan legitimasi operasional di mata regulator. Selain itu, teori pemangku kepentingan menyoroti hubungan simbiosis antara kepuasan pemangku kepentingan dan kinerja keuangan (Licandro, Burguete, Ortigueira-Sánchez, & Correa, 2024).

Perusahaan yang memenuhi ekspektasi pemangku kepentingan akan menghadapi penurunan risiko sosial, loyalitas masyarakat yang lebih tinggi, dan peningkatan kepercayaan investor. Studi ini berasumsi bahwa CSR and pengelolaan biaya lingkungan memperkuat hubungan pemangku kepentingan dan memengaruhi kinerja keuangan secara positif, khususnya di industri pertambangan, di mana tekanan sosial dan lingkungan sangat tinggi. Terlebih lagi, mengelola hubungan pemangku kepentingan dapat berfungsi sebagai strategi diferensiasi kompetitif. Perusahaan pertambangan yang menunjukkan daya tanggap terhadap masyarakat dan lingkungan memperoleh keuntungan dibandingkan pesaing mereka (Fraser, 2021).

Meningkatkan paparan sektor ini terhadap risiko reputasi yang tinggi, fluktuasi harga komoditas, dan regulasi yang ketat, teori pemangku kepentingan membenarkan investasi dalam CSR dan pengelolaan biaya lingkungan sebagai mekanisme untuk meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan jangka panjang.

Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan harus menjalankan operasinya sesuai dengan nilai dan norma sosial masyarakat untuk memperoleh pengakuan atau legitimasi

Dari lingkungan eksternal (Crossley, Elmagrhi, & Ntim, 2021; Gulluscio, 2023). Legitimasi ini berfungsi sebagai penilaian bersama bahwa tindakan perusahaan dapat diterima secara sosial, sehingga menjadi elemen krusial dalam memastikan keberlanjutan (Deswanto & Siregar, 2018). Teori legitimasi memberikan landasan teoretis untuk memahami kinerja keuangan suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan menunjukkan kepedulian terhadap masalah sosial, seperti hak pekerja, pemberdayaan masyarakat, dan keadilan, serta menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi dan akuntabilitas, perusahaan tersebut dipandang sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial.

Citra positif ini dapat menumbuhkan dukungan investor, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat hubungan dengan regulator, yang pada akhirnya meningkatkan kinerja keuangan. Dengan kata lain, teori legitimasi menjelaskan bahwa kesuksesan finansial tidak bergantung semata-mata pada efisiensi internal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh sejauh mana suatu perusahaan dapat mengamankan legitimasi sosial melalui penerapan CSR yang konsisten dan kredibel serta biaya lingkungan yang dikeluarkannya.

Pengungkapan dan pelaksanaan aspek CSR, khususnya aspek sosial dan lingkungan yang dianggap sah secara sosial, dapat memperkuat reputasi perusahaan di mata para pemangku kepentingan, mengurangi risiko sosial seperti boikot konsumen atau tekanan regulasi, dan memberikan peluang yang lebih luas untuk mengamankan sumber daya seperti modal dan akses pasar (Wahyuni & Ahdim, 2025). Teori legitimasi mengemukakan bahwa perusahaan harus menyelaraskan operasinya dengan nilai dan norma masyarakat untuk mendapatkan legitimasi. Dalam pertambangan batubara, hal ini krusial karena aktivitas pertambangan sering kali menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan dan dapat memancing penolakan publik.

Implementasi CSR yang transparan, pengungkapan biaya lingkungan, dan kepatuhan regulasi merupakan cara perusahaan dapat mempertahankan legitimasi (Caputo, Pizzi, Ligorio, & Leopizzi, 2021). Misalnya, perusahaan yang melaporkan biaya rehabilitasi lahan atau upaya pengelolaan limbah tidak hanya mematuhi regulasi tetapi juga menandakan komitmen mereka terhadap keberlanjutan. Hal ini memperkuat kepercayaan publik dan pemerintah, memfasilitasi perizinan, dan menarik investasi. Teori legitimasi menjelaskan bahwa persepsi sosial berdampak langsung pada kinerja keuangan. Perusahaan yang diakui bertanggung jawab secara sosial akan memperoleh dukungan investor, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat hubungan regulasi mereka, yang semuanya berkontribusi pada kesuksesan finansial (Glaveli, 2021).

Dalam studi ini, pengungkapan CSR dan biaya lingkungan dipandang sebagai mekanisme untuk mengamankan legitimasi sosial sekaligus mendukung kinerja keuangan dengan mengurangi risiko sosial dan meningkatkan akses

sumber daya. Selain itu, legitimasi sosial dapat bertindak sebagai penguangkit strategis. Dengan memperoleh legitimasi, perusahaan mengurangi resistensi terhadap proyek baru, meminimalkan risiko litigasi, dan mengamankan kerja sama pemangku kepentingan. Lensa teoretis ini membantu kita memahami bagaimana CSR dan pengelolaan biaya lingkungan tidak hanya memenuhi ekspektasi masyarakat tetapi juga secara tidak langsung meningkatkan kinerja keuangan melalui mitigasi risiko dan kepercayaan pemangku kepentingan yang diperkuat.

Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merujuk pada pembaruan tata kelola dan infrastruktur perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem ini dirancang untuk meminimalkan interaksi fisik antara petugas pajak (fiskus) dengan Wajib Pajak guna mengurangi risiko maladministrasi dan praktik korupsi. Salah satu pilar utamanya adalah e-Filing, yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui situs web resmi DJP atau penyedia jasa aplikasi perpajakan yang telah diakui. Kehadiran e-Filing dan sistem modern lainnya telah terbukti menyederhanakan alur birokrasi pelaporan.

Pemahaman Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

Pemahaman perpajakan merujuk pada sejauh mana Wajib Pajak mengetahui, mengerti, dan mampu mengaplikasikan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Hal ini tidak hanya mencakup pengetahuan teoritis, namun juga kapasitas praktikal seperti cara menghitung tarif pajak, memanfaatkan fasilitas pelaporan digital, dan memahami hak serta kewajibannya sebagai warga negara. Pemahaman yang tinggi dipercaya berkorelasi linear terhadap menurunnya tingkat penghindaran pajak (tax evasion).

Kepatuhan Wajib Pajak didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana Wajib Pajak secara sadar dan penuh tanggung jawab memenuhi segala kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum yang sah. Kepatuhan ini dapat dibagi menjadi kepatuhan formal (tepat waktu dalam pelaporan) dan kepatuhan material (tepat jumlah dan substansi perhitungan). Dalam pendekatan psikologi ekonomi, kepatuhan ini didorong oleh kualitas layanan dari otoritas pajak serta kepercayaan publik terhadap instansi penyelenggara negara.

Kinerja Keuangan (Financial Performance)

Menurut Deswanto dan Siregar (2018), kinerja keuangan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk mengelola dan mengendalikan sumber dayanya. Laporan keuangan umumnya digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan. Alat analisis yang tepat diperlukan untuk membuat keputusan yang selaras dengan tujuan entitas. Dengan melakukan analisis keuangan, suatu perusahaan dapat memantau kondisi keuangannya dan merancang struktur organisasinya (Njiru & Nyamute, 2018). Dalam mengevaluasi peluang bisnis entitas dan menilai kinerja perusahaan, analisis keuangan, yang mencakup rasio keuangan serta kekuatan dan kelemahan di sektor keuangan, digunakan.

Kinerja keuangan adalah salah satu aspek kunci yang perlu dipertimbangkan saat menilai seberapa baik perusahaan mencapai profitabilitas, yang krusial bagi keberlanjutan perusahaan (Rosmanidar, Putriana, & Nasution, 2024). Kinerja keuangan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola aspek keuangan perusahaan. Pihak eksternal dapat memahami kondisi keuangan perusahaan melalui berbagai aktivitas keuangan. Angka-angka ini dapat berfungsi sebagai referensi pengambilan keputusan oleh pihak eksternal, yang dapat menggunakan informasi ini untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan dapat dianalisis menggunakan rasio yang dihitung berdasarkan laporan keuangan atau data harga saham.

Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya guna menghasilkan laba (Devie, Liman, Tarigan, & Jie, 2020). Dalam pertambangan batubara, kinerja dipengaruhi oleh harga komoditas, efisiensi operasional, dan keputusan strategis mengenai investasi dan CSR. Alat analisis keuangan, termasuk rasio seperti Return on Assets (ROA) and Return on Equity (ROE), mengukur efektivitas manajemen dalam alokasi sumber daya dan pengendalian operasional. Faktor eksternal, seperti kepatuhan terhadap regulasi, dampak lingkungan, dan persepsi publik, juga memengaruhi kinerja keuangan. Perusahaan harus menyeimbangkan profitabilitas jangka pendek dengan keberlanjutan jangka panjang dengan mengintegrasikan manajemen CSR dan biaya lingkungan ke dalam perencanaan keuangan (Celestin, 2018).

Kinerja keuangan yang kuat menunjukkan integrasi yang efektif dari strategi ini dan dapat memfasilitasi akses ke modal dan manajemen risiko. Kinerja keuangan juga memengaruhi ketahanan perusahaan. Perusahaan dengan kesehatan keuangan yang kuat dapat berinvestasi dalam CSR dan program lingkungan tanpa bergantung pada pendanaan eksternal, sehingga meningkatkan keberlanjutan dan kepercayaan pemangku kepentingan. Studi ini menekankan bahwa manajemen CSR dan biaya lingkungan berfungsi sebagai alat strategis yang mendukung stabilitas keuangan dan profitabilitas jangka panjang di sektor pertambangan batubara.

Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate social responsibility (CSR) merupakan wujud kolaborasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya melalui penerapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mencapai tujuannya, yang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan finansial melainkan juga melibatkan pengamatan terhadap lingkungan sosial perusahaan guna memastikan keberlanjutan bisnis (Istan, 2024). Menurut Deswanto dan Siregar (2018), Corporate Social Responsibility (CSR) adalah sebuah konsep di mana perusahaan secara sukarela berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kebersihan lingkungan dengan mengintegrasikan isu-isu sosial dan lingkungan ke dalam operasi bisnis serta interaksinya dengan pemangku kepentingan.

Seiring berjalannya waktu, CSR menjadi krusial bagi setiap entitas bisnis karena urgensi untuk mengakomodasi kepentingan pemangku kepentingan demi memastikan keberlanjutan perusahaan. CSR merupakan kewajiban

perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar, yang melampaui batas keuntungan finansial hingga mencakup kesejahteraan sosial (Agustine & Ratmono, 2024). Banyak organisasi mengalokasikan sumber dayanya pada kegiatan CSR sebagai respons terhadap pemangku kepentingan, yang mana dapat mereduksi biaya dan mengoptimalkan laba jangka panjang mereka. CSR memegang peranan krusial untuk memenuhi komitmen kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, membangun serta memelihara relasi yang kuat dengan berbagai pihak, dan memperkuat performa keuangan perusahaan.

Manajemen diwajibkan secara aktif melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan strategi yang efektif. Transparansi dalam CSR, yang menitikberatkan pada penanganan kebutuhan pemangku kepentingan, dapat meningkatkan performa keuangan (Barlinti & Aris, 2023). CSR merepresentasikan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan di luar laba finansial. Di sektor pertambangan batubara, program CSR dapat meliputi reklamasi lahan, pengembangan masyarakat, pengelolaan

limbah, dan pelaporan inisiatif sosial yang transparan (Singh & Mishra, 2016). CSR memberikan dampak positif terhadap kinerja keuangan secara tidak langsung melalui peningkatan reputasi, penguatan hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mitigasi risiko sosial.

Perusahaan yang secara aktif terlibat dalam CSR berpeluang lebih besar untuk menarik minat investor, mengurangi potensi konflik sosial, serta memperoleh legitimasi operasional. CSR yang efektif membutuhkan perencanaan yang strategis, alokasi sumber daya yang tepat, dan keterlibatan eksekutif guna menyelaraskan inisiatif sosial dengan objektif perusahaan. CSR juga menawarkan keunggulan kompetitif. CSR yang proaktif dan transparan memungkinkan perusahaan pertambangan untuk memmanifestasikan tanggung jawab sosialnya, menumbuhkan kepercayaan, serta mengamankan investasi jangka panjang. Oleh karena itu, CSR bukan semata-mata merupakan beban biaya melainkan investasi strategis yang mampu meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan.

Kelonggaran Keuangan (Financial Slack)

Financial slack, yang didefinisikan sebagai surplus sumber daya yang melampaui kebutuhan operasional saat ini, dipandang sebagai instrumen pendukung bagi perusahaan untuk memperluas aktivitas bisnisnya dengan risiko yang lebih tinggi, seperti pengembangan produk atau jasa baru (Nazwir & Raharja, 2024). Dari sudut pandang teori cadangan keuangan, perusahaan yang memiliki cadangan keuangan cenderung memiliki kapasitas yang lebih superior untuk berinvestasi dalam aktivitas CSR yang semakin efektif (Mandasari & Rikumahu, 2025). Astuti dan Alam (2025) mengungkapkan bahwa rata-rata tingkat pengembalian pemegang saham, stabilitas imbal hasil pasar, imbal hasil saham, perubahan pola dividen pemegang saham, dan kinerja saham memberikan kontribusi yang substansial terhadap kinerja keuangan.

Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan cadangan keuangan ekstra merupakan pendorong krusial yang memotivasi perusahaan untuk berpartisipasi dalam aktivitas CSR, yang pada gilirannya dapat meningkatkan

kinerja keuangan mereka. Sumber daya finansial memegang peran vital dalam menentukan keikutsertaan suatu perusahaan dalam kegiatan sosial. Tersedianya sumber daya cadangan mencerminkan bahwa kondisi keuangan perusahaan memungkinkan terjadinya investasi pada aktivitas sosial dan lingkungan tanpa harus mengorbankan kebutuhan ekonomi fundamental yang menopang laba perusahaan dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kinerja keuangan (Tarigan & Yuliansyah, 2025).

Financial slack merepresentasikan surplus sumber daya keuangan melampaui kebutuhan operasional yang sedang berjalan, sehingga memberikan kemampuan bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam inisiatif berisiko tinggi, seperti CSR atau pengembangan proyek baru, tanpa memerlukan pembiayaan eksternal (Lu, Liu, & Osiyevskyy, 2023). Dalam sektor pertambangan batubara, financial slack yang memadai memungkinkan perusahaan untuk mendanai program-program sosial dan lingkungan, mengelola volatilitas pasar, serta merespons pergeseran regulasi. Perusahaan dengan financial slack yang cukup dapat mengalokasikan dananya secara strategis pada CSR dan pengelolaan lingkungan, sehingga menyeimbangkan antara perolehan profitabilitas dan tanggung jawab sosial.

Sebaliknya, perusahaan dengan slack yang minim mungkin akan menunda atau mengurangi porsi investasi CSR, yang secara potensial dapat merugikan reputasi dan kinerja keuangan jangka panjang mereka. Financial slack juga bertindak sebagai perisai penyangga terhadap risiko operasional dan sosial, dengan meningkatkan ketahanan terhadap tuntutan hukum (litigasi), perubahan regulasi, serta volatilitas pasar. Dalam studi ini, financial slack berperan sebagai penopang efektivitas implementasi CSR dan manajemen biaya lingkungan, yang pada gilirannya mampu meningkatkan hasil-hasil keuangan.

Biaya Lingkungan (Environmental Costs)

Biaya lingkungan timbul sebagai akibat dari merosotnya standar lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasional suatu institusi (Rosmanidar et al., 2024). Perusahaan yang secara terbuka mendeklarasikan biaya lingkungannya dipandang sebagai perusahaan yang transparan. Hal ini dikarenakan mereka memberikan informasi kepada para pemegang saham bahwa terdapat dana yang secara khusus disisihkan untuk memproteksi lingkungan dan memenuhi regulasi yang berlaku. Dalam konteks ini, pengungkapan biaya lingkungan yang ditanggung perusahaan dapat dimaknai sebagai upaya untuk mendorong transparansi dan memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan telah mengalokasikan sejumlah dana untuk konservasi lingkungan dan mematuhi hukum yang ada (Temalagi, Darmawati, & Amiruddin, 2025).

Di sektor pertambangan batubara, operasional perusahaan menghasilkan benturan lingkungan yang masif, seperti degradasi lahan, polusi air dan udara, serta eskalasi emisi karbon (Ivanova, Vesnina, Fotina, & Prosekov, 2022). Oleh karena itu, mendeklarasikan biaya lingkungan menjadi teramat esensial sebagai wujud akuntabilitas perusahaan terhadap dampak operasionalnya. Pengungkapan biaya lingkungan memproyeksikan sejauh mana perusahaan menginternalisasi biaya-biaya eksternal yang lahir dari aktivitas eksploitasi

sumber daya alam, di antaranya biaya reklamasi tambang, pengolahan limbah, restorasi ekologi, dan biaya-biaya yang berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum-hukum lingkungan.

Perusahaan pertambangan memanfaatkan manajemen biaya lingkungan untuk merebut serta mempertahankan legitimasi sosial dari masyarakat luas dan pemerintah, mengingat aktivitas pertambangan ini teramat rentan terhadap tekanan sosial maupun jerat regulasi. Semakin kolosal dampak lingkungan yang ditimbulkan, maka akan semakin nyaring tuntutan publik yang mendesak perusahaan agar secara transparan mengungkapkan biaya lingkungan. Biaya lingkungan pada prinsipnya merupakan pengeluaran yang bertalian erat dengan dampak negatif dari operasi korporasi, termasuk di dalamnya rehabilitasi lahan, tata kelola limbah, dan ketaatan pada regulasi lingkungan (Gupta, 1995).

Dalam pertambangan batubara, ongkos-ongkos ini merefleksikan tingkat transparansi dan akuntabilitas dari para pemangku kepentingan (stakeholder). Perusahaan yang merilis data biaya lingkungannya mendemonstrasikan komitmen mereka yang teguh terhadap aspek keberlanjutan dan kepatuhan hukum. Keterbukaan semacam ini sukses meredam risiko reputasi, mendongkrak kepercayaan investor, dan memperkuat fondasi legitimasi sosial. Tata kelola biaya lingkungan juga berimbas pada kinerja keuangan dengan jalan mereduksi potensi denda finansial, mengeskalasi efisiensi sumber daya, dan meningkatkan kesinambungan operasional.

Di ranah sektor pertambangan, penanaman investasi di bidang manajemen lingkungan berfungsi sebagai instrumen mitigasi atas dampak-dampak ekologis, seperti degradasi lahan, cemaran air dan udara, hingga pelepasan emisi karbon. Pendedahan (pengungkapan) atas biaya-biaya ini memberikan jaminan kepada para pemangku kepentingan eksternal bahwa mereka betul-betul memahami komitmen perusahaan dalam memikul tanggung jawab lingkungan. Berangkat dari dalil tersebut, biaya lingkungan tidak hanya bertindak sebagai piranti legitimasi, tetapi juga sebagai mekanisme tidak langsung untuk mendongkrak kinerja keuangan melalui tata kelola risiko (risk management) dan keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholder engagement).

Berdasarkan pada telaah ekstensif atas studi-studi terdahulu di sepanjang dekade terakhir, tampak adanya inkonsistensi yang kentara pada temuan-temuan terkait pengaruh corporate social responsibility, financial slack, dan biaya lingkungan terhadap capaian kinerja keuangan. Celah penelitian (research gap) inilah yang memantik motivasi studi saat ini untuk menguji ulang relasi-relasi tersebut secara spesifik pada lanskap sektor pertambangan batubara di rentang periode 2022–2024, sebuah koridor waktu yang secara presisi merefleksikan kondisi faktual sektor tersebut pada saat ini. Dari titik tolak inilah, hipotesis-hipotesis penelitian kemudian dirumuskan untuk menjembatani jurang pemahaman yang ada.

METODOLOGI

Karya tulis ilmiah ini disusun dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dan berbasis pada metode kajian literatur (library research). Data yang dihimpun sepenuhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari basis data akademik seperti Google Scholar, portal SINTA, serta jurnal-jurnal ilmiah nasional berskala terakreditasi yang diterbitkan pada rentang tahun 2021 hingga 2026. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui teknik triangulasi konseptual terhadap ragam hasil penelitian empiris terdahulu yang menelaah relasi antara implementasi teknologi administrasi perpajakan (khususnya sistem pelaporan online) dengan tingkat literasi atau pemahaman Wajib Pajak.

Studi ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Objektif dari studi ini adalah untuk menetapkan relasi kausal (sebab-akibat) di antara variabel-variabel independen dan dependen (Rezaee, Aliabadi, Dorestani, & Rezaee, 2020). Variabel-variabel independen yang dianalisis secara mendalam dalam riset ini meliputi Corporate Social Responsibility, kelonggaran keuangan (financial slack), serta biaya lingkungan. Sementara itu, variabel dependen yang dikaji adalah Kinerja Keuangan. Fokus studi ini diarahkan pada entitas-entitas perusahaan yang bernaung di bawah sektor pertambangan batubara dan telah terdaftar secara resmi di Bursa Efek Indonesia pada jendela waktu antara 2022 hingga 2024. Dalam kerangka studi ini, populasi riset terdiri atas 28 perusahaan, dan sampel yang ditarik mencakup 13 perusahaan pertambangan batubara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama kurun 2022–2024 dan telah memenuhi kriteria penarikan sampel yang ketat.

Adapun rincian operasionalisasi variabelnya adalah sebagai berikut: variabel kinerja keuangan diukur secara presisi menggunakan rasio Return on Assets (ROA); variabel CSR dikuantifikasi dengan memanfaatkan kerangka indikator GRI G4; dan financial slack dikalkulasi menggunakan formula $FCF = (\text{Laba Bersih} + \text{Beban Bunga} + \text{Beban Non-Kas})$

Peningkatan Modal Kerja - Belanja Modal. Selanjutnya, Financial Slack = $FCF / \text{Total Pendapatan}$; dan variabel biaya lingkungan diukur berpatokan pada besaran biaya pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dikeluarkan oleh perusahaan. Rangkaian data dalam studi ini kemudian dianalisis dengan mengandalkan piranti lunak EViews versi

12 Koridor teori yang diejawantahkan adalah teori pemangku kepentingan (stakeholder) dan teori legitimasi. Pengumpulan data dipungut dari situs web resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co), portal situs web masing-masing perusahaan, jurnal-jurnal ilmiah, serta serbaneka literatur lain yang menyokong dan meletakkan fondasi pijakan bagi studi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Sistem Digital dan Literasi Perpajakan

Melalui sintesis dari berbagai literatur empiris yang telah dikaji, ditemukan hasil yang konsisten. Pertama, penggunaan aplikasi e-Filing memiliki dampak yang positif dan signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak. Kemudahan operasional yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja terbukti berhasil mereduksi penumpukan antrian administratif di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menjelang batas waktu pelaporan SPT. Kedua, analisis terhadap variabel pemahaman perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak yang memiliki literasi pajak mumpuni akan cenderung menggunakan fitur teknologi dengan lebih maksimal. Keberhasilan transformasi sistem Coretax dan digitalisasi serupa menunjukkan bahwa pemahaman pajak berperan vital sebagai variabel fundamental yang memastikan kelancaran administrasi pada tingkat pengguna.

Integrasi antara teknologi perpajakan dan pengembangan sumber daya manusia (wajib pajak) adalah kunci utama modernisasi. Transformasi digital yang diwujudkan lewat e-Filing dan modernisasi fasilitas pelayanan lainnya sangat membantu memangkas jalur birokrasi sehingga probabilitas Wajib Pajak untuk patuh secara formal menjadi jauh lebih tinggi. Layanan yang cepat, aman, dan dapat dipercaya memberikan efek kepuasan yang mengikis rasa enggan dalam membayar pajak. Kendati demikian, infrastruktur digital tak ubahnya sebuah alat; efektivitasnya sangat bergantung pada penggunaannya. Di sinilah pemahaman perpajakan mengisi ruang krusial tersebut. Wajib Pajak dengan tingkat pengetahuan yang rendah rentan mengalami kebingungan meskipun antarmuka sistem sudah dibuat ramah pengguna. Implikasinya, DJP dituntut tidak hanya berfokus pada investasi perangkat keras dan lunak, tetapi juga harus secara proaktif melibatkan akademisi, konsultan pajak, dan tax center universitas (seperti di Universitas Lampung) untuk mengedukasi masyarakat secara masif.

Pengaruh CSR, Financial Slack, dan Biaya Lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian, terbukti bahwa variabel Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memancarkan pengaruh terhadap kinerja keuangan dari korporasi pertambangan batubara yang tercatat di lanskap Bursa Efek Indonesia selama kurun 2022–2024. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1), yang mendalilkan bahwa CSR memengaruhi kinerja keuangan, secara konklusif ditolak di dalam studi ini. Rentetan hasil ini memberikan indikasi bahwa level keterbukaan CSR yang telah dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan tersebut belum sanggup secara instan mendongkrak kinerja keuangan mereka. Fenomena ini juga berlaku pada kelonggaran keuangan. Dapat

Didemonstrasikan bahwa financial slack tidak menyuntikkan pengaruh terhadap capaian kinerja keuangan perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang 2022–2024. Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H2), yang mempostulatkan bahwa financial slack memengaruhi kinerja keuangan, juga menemui penolakan. Fakta ini menegaskan bahwa tersedianya pundi-pundi sumber daya keuangan yang fleksibel ternyata belum secara bermakna (signifikan) menyuburkan kinerja keuangan suatu perusahaan.

Beranjak pada aspek lingkungan, hasil kalkulasi pengujian memaparkan bahwa biaya lingkungan nyata-nyata memengaruhi kinerja keuangan korporasi pertambangan batubara yang melantai di Bursa Efek Indonesia dalam rentang 2022–2024. Dengan konfirmasi ini, hipotesis ketiga (H3), yang menyodorkan dalil bahwa biaya lingkungan menancarkan pengaruh pada kinerja keuangan, dengan teguh diterima di dalam panggung studi ini. Hasil-hasil gemilang ini menorehkan indikasi kuat bahwa semakin kolosal investasi yang dikucurkan

suatu perusahaan ke dalam bilik-bilik manajemen lingkungan, maka akan semakin prima pula profil kinerja keuangan yang diraihinya.

Tabel 1: Ringkasan Laba Emiten Batu Bara Tahun 2025

Kode Saham	6M25	6M24	Pertumbuhan (%)
BUMI	US\$ 20.4 million	US\$ 84.9M	-75.97
UNTR	IDR 8.13 million	IDR 9.53M	-14.69
CUAN	US\$ 1.94 million	US\$ 29.6M	93.45
PTBA	IDR 833 million	IDR 2.03B	-58.97
INDY	US\$ 2.24 million	US\$ 21M	-89.33
HRUM	US\$ 29.8 million	US\$ 37.4M	-20.32
BYAN	US\$ 349 million	US\$ 377M	-7.43

Tabel 2: Laba Emiten Batubara PT. BUMI di 2024

Tahun	Laba Bersih	Perubahan (%)
2022	US\$ 525.27 million	–
2023	US\$ 10.92 million	Menurun 97.92

Tabel 3: Hasil Pengujian Parsial

Variabel	Koefisien	Signifikansi	Kesimpulan
CSR	-0.786934	0.4089	Tidak Didukung
Financial Slack	-0.104137	0.6817	Tidak Didukung
Biaya Lingkungan	0.343602	0.0191	Didukung

Hasil studi ini menyodorkan pijakan wawasan (insights) yang krusial tentang bagaimana Corporate Social Responsibility (CSR), kelonggaran keuangan (financial slack), serta biaya lingkungan merajut pengaruh terhadap capaian kinerja keuangan perusahaan pertambangan batubara yang berjejer di etalase Bursa Efek Indonesia selama rentang periode 2022–2024. Melalui lensa analisis model regresi data panel, terkuak bukti bahwa biaya lingkungan menebarkan efek positif yang teruji secara statistik (signifikan) terhadap kinerja keuangan, sementara pilar CSR and financial slack justru tidak menampakkan efek yang signifikan secara statistik. Konstelasi temuan ini merajut suatu indikasi bahwa manakala kucuran investasi ke dalam bilik-bilik tata kelola lingkungan sanggup menyumbangkan impak langsung terhadap pemolesan hasil-hasil keuangan, lari-lari inisiatif CSR maupun tumpukan cadangan keuangan – bila dibiarkan berdiri

sendiri—mungkin tidak akan serta-merta mewujudkan dalam bentuk eskalasi profitabilitas yang instan.

Ketiadaan relasi (hubungan) yang signifikan antara CSR dengan kinerja keuangan menebarkan sebuah dugaan bahwa manuver-manuver CSR yang digulirkan oleh pelbagai perusahaan mungkin masih terkungkung dalam ruang lingkup yang kelewat sempit (terbatas), meleset dari bidikan target, atau bahkan tidak dipaparkan (diungkapkan) secara memadai guna meracuni secara efektif persepsi kaum investor sekaligus taksiran nilai pasar. Hipotesis ini bersenyawa secara selaras dengan sederet studi terdahulu yang membongkar fakta bahwa CSR mutlak harus dijahit (diselaraskan) secara strategis dengan denyut nadi operasi bisnis serta dikomunikasikan secara kristal kepada para pemangku kepentingan (stakeholder) demi melambungkan kinerja keuangan.

Dalam gelanggang sektor pertambangan batubara, roda inisiatif CSR acapkali hanya berkisar pada poros pengembangan masyarakat dan seluk-beluk program sosial. Kendatipun demikian, ikhtiar-ikhtiar semacam ini mungkin enggan memproduksi imbal hasil keuangan seketika, dan sebagai gantinya, lebih merepresentasikan wujud penanaman investasi jangka panjang di ladang reputasi maupun legitimasi. Terlebih lagi, eskalasi keterbukaan (pengungkapan) CSR mempertontonkan variasi yang lebar antar-perusahaan, dengan segelintir di antaranya yang tergelincir dalam menyajikan pelaporan yang komprehensif atau terstandardisasi, sebuah kecacatan yang sangat berpotensi meredam kilap impak yang kasat mata terhadap rupa-rupa metrik keuangan.

Pola serupa membayangi efek financial slack terhadap kinerja keuangan yang tak berbekas signifikan. Fenomena ini boleh jadi menembakkan sinyal bahwa kendatipun pundi-pundi sumber daya keuangan surplus menghadiahi perusahaan dengan ruang fleksibilitas, hal tersebut tak otomatis berujung pada manisnya hasil keuangan manakala dana-dana itu tak dikemudikan pengalokasiannya secara strategis. Sejatinya, financial slack berpotensi menopang injeksi investasi pada program-program CSR dan pro-lingkungan, menstimulasi inovasi, serta memacu efisiensi operasional. Namun, andai sumber daya ini tidak dinakhodai secara piawai atau tidak disuntikkan ke dalam nadir-nadir aktivitas pencetak nilai (value-generating), maka benturannya terhadap pilar profitabilitas bisa jadi terlampau kerdil. Penjabaran ini menggarisbawahi urgensi mahakarya dari serangkaian keputusan manajemen keuangan dan perancangan strategi dalam rangka mendayagunakan sumber daya slack (kelonggaran) guna mereparasi performa (kinerja).

Kontras dengan itu, efek positif nan signifikan yang dilahirkan oleh biaya lingkungan merangkai bukti telanjang bahwa perusahaan-perusahaan yang bergiat aktif menggelontorkan investasi guna memitigasi efek samping lingkungan dari manuver operasionalnya, justru mengecap nikmatnya kinerja keuangan yang kian rupawan. Realitas ini bisa merujuk pada beberapa mekanisme yang bekerja di balik layar, termasuk beberapa hal krusial berikut ini. Pertama, membengkaknya biaya (pengeluaran) lingkungan efektif menyusutkan belenggu liabilitas potensial yang bergandengan erat dengan aturan-aturan lingkungan, jerat denda, serta ongkos-ongkos remediasi (pemulihan). Kedua, aksi ini mengirimkan gelombang sinyal kepada kaum investor beserta para pemangku

kepentingan bahwa perusahaan tersebut menjalankan kemudi operasinya secara berkesinambungan (sustainable), sehingga otomatis menyepuh kemilau legitimasinya, merajut kepercayaan, dan mengukuhkan konfidensi investor di arena jangka panjang. Ketiga, tata kelola lingkungan yang berefisiensi tinggi dapat berbuah pada serangkaian efisiensi operasional semacam optimalisasi konsumsi sumber daya, penghematan asupan energi, dan pereduksian volume limbah, yang pada gilirannya mencetak pengaruh positif di atas neraca profitabilitas.

Angka koefisien determinasi (R^2) untuk model gabungan ini menunjuk pada fakta bahwa Corporate Social Responsibility (CSR), kelonggaran keuangan (financial slack), serta biaya-biaya lingkungan, jika dihimpun secara kolektif, sanggup menjelaskan sekitar 38,35% dari rupa-rupa variasi pada kanvas kinerja keuangan. Walaupun angka ini menyiratkan kekuatan penjelas pada derajat moderat (menengah), temuan ini juga secara implisit menyuarakan bahwa serombongan faktor-faktor lain, sebut saja tata kelola korporasi yang baik (corporate governance), iklim pasar, volatilitas harga-harga komoditas, dan tingkat efisiensi operasional, ikut memainkan lakon yang berbobot (substansial) dalam mengukir nasib kinerja keuangan. Pembedahan terhadap efek secara parsial kian menegaskan bahwa dari sekumpulan tiga variabel tersebut, tata kelola (manajemen) biaya lingkungan sukses memahkotai dirinya sebagai motor penggerak paling perdana yang menyetir roda hasil-hasil keuangan di kancah sektor pertambangan batubara.

Rentetan temuan-temuan ini membawa sederet implikasi aplikatif (praktis) bagi manajemen yang menduduki pucuk pimpinan perusahaan-perusahaan tersebut. Perusahaan semestinya menempatkan program-program tata kelola lingkungan yang transparan sekaligus efektif di atas singgasana prioritas, berhubung inisiatif tersebut menderaskan guyuran manfaat keuangan yang secara terukur dapat dikalkulasi (measurable). Sementara itu, kendatipun CSR dan pilar financial slack (kelonggaran keuangan) tetap memegang posisi sentral demi alasan-alasan perumusan strategi jangka panjang dan perawat reputasi, namun para manajer wajib menggaransi bahwa inisiatif-inisiatif ini disatupadukan (diintegrasikan) secara mulus ke dalam strategi-strategi operasional maupun finansial agar porsi kontribusinya terhadap Kinerja Keuangan kian mencuat. Secara lebih jauh, pijakan dari riset ini turut menggarisbawahi keharusan mendesak akan adanya penyeragaman (standardisasi) dalam hal pelaporan CSR dan pengungkapan rincian biaya lingkungan, semata-mata demi memeras sebanyak-banyaknya faedah (nilai tambah) dari inisiatif-inisiatif mulia tersebut bagi kemaslahatan para pemangku kepentingan (stakeholder) tak terkecuali kaum investor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem e-Filing dan tingginya pemahaman perpajakan secara simultan efektif dan signifikan dalam mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kehadiran teknologi meruntuhkan rintangan administratif, sementara pemahaman masyarakat menguatkan fondasi integritas self-assessment. Riset ini ditujukan untuk membedah secara menyeluruh mengenai efek-efek yang

ditimbulkan oleh pendedahan (pengungkapan) Corporate Social Responsibility (CSR), kelonggaran keuangan (financial slack), dan rupa-rupa biaya lingkungan terhadap raut wajah kinerja keuangan (financial performance) yang bersemayam pada sektor pertambangan batubara dan bertengger di Bursa Efek Indonesia pada jenjang waktu 2022–2024. Berlandaskan pada ragam temuan yang telah dideskripsikan panjang lebar di fragmen sebelumnya, sepasang konklusi berikut ini dapat ditarik menjadi sebuah rangkuman.

Potret dari deretan hasil kajian memamerkan fakta bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan kelonggaran keuangan (financial slack) sama sekali tidak merajut efek apapun terhadap capaian kinerja keuangan dari sekumpulan korporasi pertambangan batubara yang tercatat pada bursa saham nasional di kurun waktu pengamatan 2022–2024. Biaya-biaya lingkungan juga gagal memancarkan pengaruhnya ke atas performa (kinerja) keuangan dari entitas-entitas pertambangan batubara yang terdaftar di lantai Bursa Efek Indonesia pada garis masa 2022–2024. Dari sudut pandang kalkulasi koefisien determinasi (R^2), perolehan hasil uji mendemonstrasikan bahwa gabungan pengaruh keroyokan dari pelaporan Corporate Social Responsibility, financial slack, dan biaya lingkungan terhadap rupa kinerja keuangan sanggup menyentuh level 38,35%.

Keterbatasan Penelitian

Studi akademis ini tentu saja tak kebal dari serangkaian keterbatasan (limitasi) yang semestinya ditelaah dan direnungkan masak-masak oleh gerbong peneliti-peneliti di hari esok. Deretan keterbatasan yang memayungi studi ini adalah sebagai berikut: Poin pertama, cakupan ukuran sampel (sample size) yang dioperasikan dalam medan studi ini tergolong masih terbatas (sempit), mengingat fokus pijakannya yang cuma menukik ke satu sektor industri semata. Mengakar dari realitas tersebut, konklusi-konklusi yang dipanen dari studi ini jelas belum mampu memotret dan mengilustrasikan anatomi kondisi pada sektor-sektor industri lainnya secara paripurna. Poin kedua, durasi atau periode observasi yang memagari studi ini relatif teramat singkat, yakni cuma menjangkau kurun tiga tahun lamanya (2022–2024), sehingga pada akhirnya gagal menorehkan lukisan gambaran yang komprehensif terkait kondisi yang terbentang pada bentang waktu yang lebih merentang panjang.

Saran dan Arahan untuk Peneliti Selanjutnya

Rekomendasi yang dapat diusulkan kepada pihak otoritas pajak adalah penggiatan sosialisasi sistem secara beriringan dengan edukasi dasar perpajakan, khususnya menyasar kelompok Wajib Pajak pemula dan pelaku UMKM. Studi akademis ini sangat diharapkan sanggup menjelma menjadi menara referensi pemicu rujukan bagi ekspedisi-ekspedisi penelitian berikutnya pada topik-topik yang bersinggungan, secara spesifik berkaitan dengan terjangan efek dari pengungkapan corporate social responsibility, financial slack, serta porsi biaya lingkungan yang diarahkan ke dalam urat nadi kinerja keuangan. Peneliti-peneliti di fase yang akan datang teramat disarankan untuk menyuntikkan rupa-rupa variabel ekstra yang melampaui barisan variabel yang telah dieksploitasi dalam kancah riset ini, memperlebar luasan populasi kajian, mengintegrasikan bermacam variabel tambahan yang menaruh potensi untuk

menyetir kinerja keuangan, dan juga merentangkan horison waktu (periode) studi demi memborong pemahaman yang membentang jauh lebih komprehensif mengupas faktor-faktor determinan di balik kinerja keuangan.

Elemen-elemen yang disinggung barusan mencakup aspek Good Corporate Governance (GCG), Environmental, Social, and Governance (ESG), hingga sederet variabel pengganti lainnya yang diindikasikan kuat mempunyai andil pengaruh di dalam labirin kinerja keuangan suatu entitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustine, Y. S., & Ratmono, D. (2024). Pengaruh corporate social responsibility terhadap Kinerja keuangan dengan kepemilikan institusional dan kompensasi eksekutif sebagai variabel moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 13 (3), 1-14.
- Al Daffa, M. (2024). Biaya Lingkungan Dan Pengungkapan Csr Berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 4 (1), 625-634.
- Ardiansyah, M. (2024). Integrating corporate social responsibility into business strategy: creating sustainable value. *Involvement International Journal of Business*, 1 (1), 29-42. doi: <https://doi.org/10.62569/ijb.v1i1.5>
- Astuti, A., & Alam, I. A. (2025). The Effect of Work Motivation and Work Discipline on Employee Performance at the Regional Financial and Asset Management Agency. *Jurnal Relevansi: Ekonomi, Manajemen dan Bisnis*, 9 (1), 137-153.
- Barlinti, R. A., & Aris, M. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Volume Penjualan terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Manajemen*, 4 (3), 235-247. doi:<https://doi.org/10.35912/jakman.v4i3.1050>
- Caputo, F., Pizzi, S., Ligorio, L., & Leopizzi, R. (2021). Enhancing environmental information transparency through corporate social responsibility reporting regulation. *Business strategy and the environment*, 30 (8), 3470-3484. doi: <https://doi.org/10.1002/bse.2814>
- Celestin, M. (2018). The impact of sustainable cost accounting on business profitability: Balancing financial performance with environmental

- responsibility. *Brainae Journal of Business, Sciences and Technology (BJBST)*, 2 (4), 694-705.
- Crossley, R. M., Elmagrhi, M. H., & Ntim, C. G. (2021). Sustainability and legitimacy theory: The case of sustainable social and environmental practices of small and medium-sized enterprises. *Business strategy and the environment*, 30 (8), 3740-3762. doi: <https://doi.org/10.1002/bse.2837>
- Deswanto, R. B., & Siregar, S. V. (2018). The associations between environmental disclosures with financial performance, environmental performance, and firm value. *Social Responsibility Journal*, 14 (1), 180-193. doi: <https://doi.org/10.1108/srj-01-2017-0005>
- Devie, D., Liman, L. P., Tarigan, J., & Jie, F. (2020). Corporate social responsibility, financial performance and risk in Indonesian natural resources industry. *Social Responsibility Journal*, 16 (1), 73-90. doi: <https://doi.org/10.1108/srj-06-2018-0155>
- Endri, E., Utama, A. P., Effendi, M. S., Santoso, B., & Bahiramsyah, A. (2021). Coal price and profitability: Evidence of coal mining companies in Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 11 (5), 363-368. doi: <https://doi.org/10.32479/ijeep.11503>
- Fraser, J. (2021). Mining companies and communities: Collaborative approaches to reduce social risk and advance sustainable development. *Resources Policy*, 74, 101144. doi: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.02.003>
- Glaveli, N. (2021). Corporate social responsibility toward stakeholders and customer loyalty: Investigating the roles of trust and customer identification with the company. *Social Responsibility Journal*, 17 (3), 367-383. doi: <https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2019-0257>
- Gudio, H. T. (2025). Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Pertambangan Batu Bara Yang Terdaftar Di Bei Literature Review: Kinerja Keuangan Suatu Kajian Dari Aspek Kinerja Lingkungan. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 2 (3), 2051-2058. doi: <https://doi.org/10.70248/jmie.v2i3.2165>

- Gulluscio, C. (2023). Legitimacy theory Encyclopedia of sustainable management (pp. 2209-2215): Springer.
- Gupta, M. C. (1995). Environmental management and its impact on the operations function. *International Journal of Operations & Production Management*, 15 (8), 34-51. doi: <https://doi.org/10.1108/01443579510094071>
- Iriyani, A. B. A., Zubaidah, S., Saputri, N. A., & Jati, A. W. (2022). The Effect Of Environmental Costs and Environmental Performance Disclosures On Profitability (Empirical Study On Mining Companies Listed On The Indonesia Stock Exchange). *Proceedings of Islamic Economics, Business, and Philanthropy*, 1 (2), 445-459.
- Istan, M. (2024). The impact of good corporate governance and corporate social responsibility on corporate value: The moderating role of financial performance. *Journal of Logistics, Informatics and Service Science*, 11 (2), 202-220.
- Ivanova, S., Vesnina, A., Fotina, N., & Prosekov, A. (2022). An overview of carbon footprint of coal mining to curtail greenhouse gas emissions. *Sustainability*, 14 (22), 15135. doi: <https://doi.org/10.3390/su142215135>
- Licandro, O., Burguete, J. L. V., Ortigueira-Sánchez, L. C., & Correa, P. (2024). Corporate social responsibility and financial performance: A relationship mediated by stakeholder satisfaction. *Administrative Sciences*, 14 (1), 15. doi: <https://doi.org/10.3390/admsci14010015>
- Lu, H., Liu, X., & Osiyevskyy, O. (2023). Doing safe while doing good: Slack, risk management capabilities, and the reliability of value creation through CSR. *Strategic Organization*, 21 (4), 874-904. doi: <https://doi.org/10.1177/14761270221122428>
- Mandasari, R., & Rikumahu, B. (2025). The impact of capital structure, investment growth, and liquidity on financial performance of automotive companies and its components on the Indonesia Stock Exchange (2018-

- 2022). *Global Academy of Business Studies*, 1 (3), 211-224. doi: <https://doi.org/10.35912/gabs.v1i3.3568>
- Nazwir, P. W., & Raharja, S. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Financial Slack terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 13 (2), 670-683. doi:<https://doi.org/10.30588/jmp.v13i2.1546>
- Njiru, J. N., & Nyamute, W. (2018). The effect of organizational structure on financial performance of commercial state corporations in Kenya. *International Journal of Finance and Accounting*, 3 (2), 72-87. doi: <https://doi.org/10.47604/ijfa.757>
- Pramudianti, P. (2023). Pengaruh Pengungkapan Akuntansi Hijau (Green Accounting) Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021 (Studi Konseptual). *Akuntansi* 45, 4 (2), 243-253. doi:<https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v4i2.1841>
- Rani Cahyati et al. (2025). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, Keamanan, Kesiapan Teknologi Informasi serta Penerapan Sistem e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 2(1).
- Rezaee, Z., Aliabadi, S., Dorestani, A., & Rezaee, N. J. (2020). Application of time series models in business research: correlation, association, causation. *Sustainability*, 12 (12), 4833. doi: <https://doi.org/10.3390/su12124833>
- Rosmanidar, E., Putriana, M., & Nasution, M. A. P. (2024). Pengaruh Biaya Lingkungan Dan Kinerja Lingkungan Terhadap Kinerja Keuangan: Studi Kasus Pada Perusahaan Basic Materials Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia Tahun 2017-2021. *E-BISNIS: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17 (1), 111-125. doi:<https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v17i1.1770>
- Septiyanti, R., Agustina, Y., & Syaipudin, U. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Instansi di Era Transformasi Digital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 26(2), 65-74.

- Singh, P. K., & Mishra, A. K. (2016). Analysis of the contribution of corporate social responsibility (CSR) initiatives of Indian coal mining industry in sustainable development. *Int J Innov Res Sci Eng Technol*, 5 (4), 5858-5869.
- Siregar, F. H., Syahyunan, S., & Miraza, Z. (2022). Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1 (2), 187-205. doi:<https://doi.org/10.55983/inov.v1i2.114>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartina. (2022). Upaya Peningkatan Pelayanan Pada Kantor UPTD Samsat Tulang Bawang Melalui Survei Tentang Tingkat Kepuasan Pajak Kendaraan. *Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik*, 8(2), 48-55.
- Tarigan, B. T., & Yuliansyah, Y. (2025). The Implementation of Good Corporate Governance on Company Financial Performance. *Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 1 (4), 243-254. doi:<https://doi.org/10.61401/rabi.v1i3.211>
- Temalagi, S., Darmawati, D., & Amiruddin, A. (2025). Environmental Social Governance (ESG) Score and Return on Equity (ROE) on company values which registered in IDX ESG Leaders. *Advances in Management and Business Studies*, 1 (1), 61-70.
- Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. *Journal Of Macroeconomics and Social Development*, 1(4), 1-19.
- Wahyuni, F., & Ahdim, H. S. (2025). Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social, and Governance terhadap Kinerja Keuangan dengan Financial Slack sebagai Moderasi. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 9 (1), 204-227. doi:<https://doi.org/10.18196/rabin.v9i1.27002>